

BAHAN AJAR PERTEMUAN 12

Periode 1950 - Masa Sekarang

1990: Reunifikasi Jerman

Pada tanggal 3 Oktober berakhir eksistensi **RDJ**. Persatuan negara Jerman telah dipulihkan. Pada tanggal 2 Desember 1990 berlangsung pemilihan pertama untuk Bundestag yang diadakan di seluruh Jerman. Helmut Kohl (CDU) menjadi Kanselir Federal pertama dari Jerman Bersatu.

→

Penyatuan Kembali Jerman

Penyatuan kembali Jerman ([Jerman](#) *Deutsche Wiedervereinigung*) berlangsung pada tanggal [3 Oktober 1990](#), ketika mantan daerah Republik Demokratik Jerman ("[Jerman Timur](#)") digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman ("[Jerman Barat](#)").

Selepas pemilihan umum bebas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, rundingan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat selesai dalam satu kesatuan perjanjian, manakala rundingan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat serta empat kuasa pendudukan menghasilkan kononnya "Perjanjian dua tambah empat" yang menegaskan kedaulatan penuh kepada negara kesatuan [Jerman](#).

Negara Jerman yang telah bersatu menjadi anggota Komunitas Eropa (kemudian [Uni Eropa](#)) dan NATO. Istilah "Penyatuan kembali" digunakan berbeda dengan persatuan awal Negara Jerman pada tahun [1871](#). Walaupun biasanya disebut dengan istilah "Penyatuan kembali", ia sebenarnya suatu "penyatuan" bagi negeri Jerman kepada satu entitas yang lebih besar, yang tidak pernah ada sebelum ini. Para politisi Jerman sendiri menghindari pemakaian istilah seperti ini dan lebih suka menyebutnya sebagai *die Wende*.

Latar belakang



Pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur

Selepas habisnya [Perang Dunia II](#) di Erop, Negara Jerman telah dibagi-bagi menjadi empat zona pendudukan. Ibu kota lama [Berlin](#), sebagai pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi empat zona. Meskipun niat kuasa pendudukan adalah untuk mengawal Jerman bersama-sama dari tahun 1947, kedatangan [Perang Dingin](#) menyebabkan Perancis, Britania Raya dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam Republik Federal Jerman (dan [Berlin Barat](#)) pada 1949, tidak termasuk zona [Uni Soviet](#) yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman (termasuk [Berlin Timur](#)) pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan syarat-syarat Konferensi Yalta pada Februari 1945, wilayah-wilayah timur Pomerania dan Silesia, serta separuh daripada selatan Prusia Timur, diberikan kepada Polandia dan separuh daripada utara Prusia Timur (kini dikenal sebagai [Kaliningrad Oblast](#)) diberikan kepada Uni Soviet.

Jerman Barat dan Jerman Timur kedua-dua mengklaim sebagai pengganti sah bagi penduduk Kerajaan Jerman yang Lama (*Deutsches Reich*). Bagaimanapun jua, Jerman Timur mengubah pendapatnya selepas itu, dan menyatakan bahwa Negara Jerman telah berhenti ada pada tahun 1945 dan bahwa kedua-dua Jerman Barat dan Jerman Timur adalah negara baru.

Rencana pertama untuk menyatukan bagi-bagian wilayah Jerman diajukan oleh [Josef Stalin](#) pada 1952 di bawah syarat-syarat sebagaimana yang kemudian diambil untuk [Austria](#) (lihat [Perjanjian Negeri Austria](#)). Ia memerlukan penciptaan satu Negara Jerman yang netral dengan

sebuah perbatasan timur yang disebut sebagai [Perbatasan Oder-Neisse](#) dan semua pasukan bersekutu dipindahkan pada tahun yang sama. Pemerintahan Jerman Barat di bawah Kanselir Konrad Adenauer lebih menyukai integrasi lebih dekat dengan Eropa Barat dan meminta Penyatuan kembali dirundingkan dengan syarat pemilihan umum seluruh Jerman dan dipantau Dunia Internasional. Syarat ini ditolak oleh Uni Soviet. Satu lagi rencana Stalin ialah melibatkan Penyatuan kembali Negara Jerman dengan mengikuti perbatasan sesuai tanggal 31 Desember 1937 di bawah syarat bahwa Negara Jerman bergabung dengan Pakta Warsawa (Blok Timur).



Pendudukan Jerman pada 1945

Mulai 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun (*Wirtschaftswunder*). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang masih melihat ke Barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat (yang mana [Tembok Berlin](#) adalah bagian darinya) pada [1961](#) untuk mencegah pelarian massal ini.

Pemerintahan Jerman Barat dan sekutu NATO-nya pada mulanya tidak mengakui Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) atau Republik Rakyat Polandia, mengikut [Doktrin Hallstein](#). Hubungan antara Jerman Timur dan Jerman Barat senantiasa dingin sehingga Kanselir Barat Willy Brandt melancarkan pemulihan hubungan baik yang kontroversial dengan Jerman Timur (*Ostpolitik*) pada tahun 1970-an.

Berakhirnya pemisahan (*die Wende*)

Pada pertengahan tahun [1980](#)-an Penyatuan kembali Jerman oleh rakyat Jerman Barat dan Timur secara luas dianggap sebagai suatu cita-cita atau harapan tinggi tak terhingga yang sulit dicapai. Namun harapan untuk Penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang digelindingkan oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev di tahun 1985. Setelah ini angin perubahan mulai berhembus di Blok Timur, dan memunculkan harapan baru di dalam Jerman Timur.

Pada bulan Agustus 1989, pemerintahan reformis Hongaria menghilangkan peraturan ketat di perbatasannya dengan Austria dan pada September lebih dari 13.000 warga Jerman Timur bisa melarikan diri ke Barat melalui Hongaria. Ribuan warga Jerman Timur berusaha mencapai Jerman Barat dengan mengadakan aksi pendudukan kantor-kantor perwakilan diplomatik Jerman Barat di ibu kota-ibu kota negara-negara Eropa Timur, terutama di Praha, Ceko, Slowakia. Pemerintahan Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) lalu mengumumkan akan memberikan fasilitas dengan mengoperasikan kereta-kereta api ekstra yang membawa mereka ke Jerman Barat dan menyatakan bahwa mereka mengusir "para pengkhianat antisosial yang tak

bertanggung jawab dan kaum kriminal"^[11]. Sementara itu demonstrasi menentang rezim Jerman Timur berawal di tanah air sendiri, terutama yang paling penting adalah demonstrasi-demonstrasi Senin di [Leipzig](#).

Pada tanggal 6–7 Oktober 1989, Gorbachev melawat Jerman Timur untuk memperingati hari ulang tahun Jerman Timur yang ke-40 dan mendorong para pemimpin Jerman Timur untuk menerima perubahan. Berhadapan dengan huru-hara, pemimpin Jerman Timur [Erich Honecker](#) telah dipaksa untuk meletakkan jabatan pada [18 Oktober 1989](#) oleh anggota [Politburonya](#) sendiri dan digantikan oleh [Egon Krenz](#). Hal ini diikuti dengan pengunduran diri besar-besaran anggota kabinet Jerman Timur yang akhirnya jatuh pada tanggal 7 November. Lalu Gunther Schwabowski sebagai juru bicara pemerintahan Jerman Timur pada tanggal 9 November malam mengumumkan di televisi bahwa semua restriksi perjalanan ke Jerman Barat dihilangkan. Semula warga Jerman Timur kurang mengerti maksud pernyataannya. Setelah itu jutaan warga Jerman Timur berbondong-bondong pergi ke pos-pos perbatasan yang kemudian dibuka oleh para penjaga perbatasan. Setelah itu banyak warga Jerman baik Barat dan Timur memberanikan diri merusak Tembok Berlin. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa berita mengesankan pada abad ke-20.

Pada tanggal 18 Maret 1990 pemilihan umum bebas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur telah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama untuk berunding dengan Jerman Barat masalah persatuan dan membubarkan dirinya sendiri. Seorang ahli ideologi ternama Jerman Timur dalam 1989, menyatakan "Polandia akan tetap menjadi Polandia meskipun komunisme runtuh, tetapi tanpa komunisme negara Jerman Timur tidak mempunyai alasan untuk tetap berdiri."^[12]

Di bawah Perdana Menteri Lothar de Maizière, Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat, Britania Raya, Perancis, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai syarat-syarat untuk Penyatuan kembali Jerman. Karena keberatan Uni Soviet bahwa Jerman Timur ditarik menjadi anggota NATO, maka sebuah perjanjian dibuat bahwa Jerman yang bersatu boleh tetap menjadi anggota NATO, namun tentara NATO tidak boleh ditaruh di Jerman Timur. Selain itu Kanselir Helmut Kohl meyakinkan para pemimpin Perancis dan Britania Raya bahwa mereka tidak perlu khawatir bahwa sebuah Jerman yang bersatu akan mengancam mereka dengan berjanji bahwa sebuah Negara Jerman bersatu akan lebih berusaha berintegrasi dengan Uni Eropa.

Paralel dengan perundingan multilateral, rundingan bilateral antara pemerintahan Timur dan Barat berlangsung dan menuju pada penanda tangan perjanjian pada tanggal 18 Mei 1990 untuk Uni Ekonomi, Sosial dan Moneter yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 1990. Pada tanggal 23 Agustus, *Volkskammer* (Parlemen Jerman Timur) mengesahkan tanggal 3 Oktober 1990 sebagai tanggal bergabungnya Jerman Timur dengan Jerman Barat.

Einigungsvertrag ("Perjanjian Persatuan") telah ditanda tangani pada tanggal 31 Agustus 1990 oleh wakil-wakil Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tanggal 12 September 1990 Perjanjian Penyelesaian Akhir yang Berkenaan dengan Negara Jerman ("Perjanjian Dua tambah Empat") telah ditandatangani dan secara resmi mendirikan ulang kedaulatan kedua-dua negara Jerman.

Penyatuan kembali

Negara Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada tanggal 3 Oktober 1990 ketika enam negara bagian Jerman Timur (*Bundesländer*); [Brandenburg](#), [Mecklenburg-Vorpommern](#), [Sachsen](#), [Sachsen-Anhalt](#), [Thüringen](#), dan [Berlin bersatu](#) secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman (Jerman Barat), memilih salah satu dari dua opsi yang diterapkan dalam Konstitusi Jerman Barat (*Grundgesetz*). Maka dengan masuknya secara resmi lima negara bagian Jerman yang kembali didirikan ke Jerman Barat sesuai Pasal 23, lalu wilayah di mana *Grundgesetz* (Undang-Undang Dasar) berlaku diperluas untuk memuat mereka. Alternatifnya ialah bahwa Jerman Timur bergabung secara keseluruhan dalam rangka persatuan resmi antara dua negara Jerman, yang lalu antara lain harus membuat Konstitusi baru bagi negara yang baru saja didirikan. Meski opsi yang dipilih lebih sederhana, hal ini telah menjadi alasan adanya

sentimen-sentimen tertentu di Timur bahwa mereka telah "diduduki" atau "dianeksasi" oleh Republik Federal Jerman yang lama (Jerman Barat).

Untuk memudahkan proses ini dan untuk meyakinkan negara-negara lain, Jerman Barat membuat beberapa perubahan kepada "Undang-undang Dasar". Pasal 146 diubah sehingga Pasal 23 dari konstitusi yang berlaku bisa dipakai untuk Penyatuan kembali. Lalu, jika lima "negara bagian yang telah didirikan ulang" di Jerman Timur sudah bergabung, maka Undang-Undang Dasar bisa diubah lagi untuk menyatakan bahwa *tidak ada daerah Jerman lainnya yang ada di luar wilayah negara kesatuan yang belum bergabung*. Namun konstitusi ini bisa diubah lagi di masa depan dan hal ini masih memungkinkan diambilnya sebuah konstitusi lain di masa depan oleh bangsa Jerman.

Pada tanggal 14 November 1990 pemerintah Jerman menanda tangani sebuah perjanjian dengan Polandia yang menyangkut perbatasan mereka yang dikenal sebagai [Perbatasan Oder-Neisse](#), dan demikian, melepaskan tuntutan mereka untuk [Silesia](#), [Pomerania](#), [Danzig](#) (Gdańsk), dan [Prusia Timur](#). Bulan berikut, pemilihan umum bebas pertama bagi seluruh rakyat Jerman semenjak tahun 1932, diadakan. Hasil pemilu ialah mayoritas yang bertambah besar bagi pemerintahan koalisi [Helmut Kohl](#).

Efek persatuan ulang



Di seantero mantan wilayah Jerman Timur ditemukan banyak fasilitas-fasilitas militer yang telah ditinggalkan. Barak Nedlitz dekat Potsdam, seperti dilihat pada bulan Agustus 2002, sedang dikembangkan kembali.

Biaya persatuan ulang telah menimbulkan suatu beban yang berat kepada ekonomi Jerman dan telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jerman menjadi tersendat-sendat dalam tahun-tahun terakhir ini. Biaya persatuan ulang diperkirakan berjumlah lebih dari € 15 trilyun (pernyataan *Freie Universität Berlin*). Jumlah ini lebih besar daripada hutang negara Jerman.

Sebab utama untuk biaya yang sangat besar ini adalah lemahnya ekonomi Jerman Timur, khususnya jika diperbandingkan dengan Jerman Barat; lalu nilai tukar di antara mata uang Jerman Timur dan Jerman Barat yang secara artifisial ditinggikan demi alasan politik, dengan hasil Jerman Barat harus melunasi rekening ini.

Walaupun dilakukan investasi besar-besaran oleh Jerman Barat, banyak perusahaan Jerman Timur hancur ketika harus bersaing dengan Jerman Barat. Malah sapa sekarang, pemerintah Jerman memberikan lebih dari € 10 milyar demi perkembangan negara-negara bagian yang terletak di mantan Jerman Timur.

Selama tahun 1980-an, ekonomi kapitalis Jerman Barat menjadi makmur, sedangkan ekonomi komunis Jerman Timur merosot; sesudah itu, suplai barang-barang dan jasa ke Jerman Timur menegangkan sumber penghasilan Barat.

Industri yang dulu tidak perlu bersaing karena didukung oleh pemerintah Jerman Timur harus diswastanisasikan, seringkali hal ini menghasilkan kebangkrutan mereka.

Sebagai akibat daripada persatuan ulang, kebanyakan mantan daerah Jerman Timur telah kehilangan industrinya, menyebabkan suatu pengangguran yang bisa sebesar kira-kira 25 % di beberapa bagian daerah. Semenjak itu, ratusan ribu warga mantan Jerman Timur secara berkesinambung berhijrah ke wilayah barat untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan wilayah timur kehilangan tenaga-tenaga kerja profesional.

Menurut Bank Sentral Jerman (*Bundesbank*) sebab dari banyak masalah di ekonomi Jerman sejatinya berakar pada persatuan ulang ini dan bukannya introduksi mata uang [Euro](#) pada tahun 2002 seperti dinyatakan oleh banyak ekonom^[3].

Catatan dari teks asli:

Deutsche Wiedervereinigung



Heutige Bundesrepublik Deutschland, darüber die nach 1948 geteilten Gebiete:

- Bundesrep. Deutshl. (bis 1990),
- Berlin (West) (→ [Berlin-Frage](#)),
- DDR (Beitritt 1990) und
- Saarland (Beitritt 1957, → [Saarstatut](#))

Als **Deutsche Wiedervereinigung** wird der durch die [friedliche Revolution in der DDR](#) angestoßene Prozess der Jahre 1989 und 1990, der zum Beitritt der [Deutschen Demokratischen Republik](#) zur [Bundesrepublik Deutschland](#) am 3. Oktober 1990 führte, bezeichnet. Die damit vollzogene *Deutsche Einheit*, die seither an jedem 3. Oktober als [Nationalfeiertag](#) begangen wird, beendete den als Folge des [Zweiten Weltkrieges](#) in der Ära des [Kalten Krieges](#) vier Jahrzehnte währenden Zustand der [Deutschen Teilung](#).^[1]

Richtungweisend für diese Entwicklung war die [Öffnung der Berliner Mauer](#) am 9. November 1989, die den endgültigen Zerfall des [politischen Systems der DDR](#) bewirkte. Notwendige äußere Voraussetzung der deutschen Wiedervereinigung war das Einverständnis der vier [Siegermächte](#) des Zweiten Weltkrieges, die bis dahin formalrechtlich noch immer die Verantwortung für [Deutschland als Ganzes](#) innehatten beziehungsweise beanspruchten. Im [Zwei-plus-Vier-Vertrag](#) (*Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland*) wurde die Einheit der beiden deutschen [Staaten](#) legitimiert, womit sie [völkerrechtlich](#) vereint sowie das [Deutsche Volk](#) und seine [Territorien \(Länder\)](#) wiedervereinigt werden konnten. [Staatsrechtlich](#) wird von „Beitritt zum Geltungsbereich des [Grundgesetzes](#) der Bundesrepublik Deutschland“ gesprochen, politisch und [sozioökonomisch](#) von der Vereinigung der DDR mit der Bundesrepublik.

Maßgebliche Zwischenstationen auf dem Weg der deutschen Wiedervereinigung waren die [Volkskammerwahl im März 1990](#) sowie der Staatsvertrag über die [Währungs-, Wirtschafts- und](#)

[Sozialunion](#). Am 23. August 1990 stimmte die DDR-Volkskammer dem [Einigungsvertrag](#) zu, am 31. August folgten [Bundestag](#) und [Bundesrat](#).

Juristischer Charakter

Nach [herrschender Lehre](#) ([Bundesverfassungsgericht](#) 1973) ist das [1945 besiegte Deutsche Reich](#) als [Staats-](#) und [Völkerrechtssubjekt](#) nicht untergegangen, sondern war lediglich handlungsunfähig geworden. Die Gründung der [Bundesrepublik](#) Deutschland stellte somit eine Neuorganisation des bisherigen Staates dar.^[2] Die Bundesrepublik steht damit in staatsrechtlicher Kontinuität des [Norddeutschen Bundes](#) von 1867 und ist identisch mit dem vier Jahre später in [Form](#) der [Monarchie](#) gegründeten [Deutschen Reich](#); das schließt aber keinen Bezug auf das Territorium ein (siehe [Rechtslage des Deutschen Reiches nach 1945](#)). Das [Saarland](#) trat nach einer Volksabstimmung 1955 schließlich zum 1. Januar 1957 der Bundesrepublik bei, das Gebiet der [Sowjetischen Besatzungszone](#) bildete die [DDR](#).

Verfassungs- und staatsrechtlich handelte es sich bei der Wiedervereinigung von 1990 um den [Beitritt](#) der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes durch einen Beschluss der [Volkskammer](#)^[3], welcher durch die Eingliederung der einen Monat zuvor durch das [Ländereinführungsgesetz](#)^[4] am 22. Juli mit Wirkung zum 14. Oktober 1990 (auf den 3. Oktober vorgezogen) neu gebildeten fünf ostdeutschen Länder und Ost-Berlins in den Bund vollzogen wurde. Man spricht daher auch offiziell vom [Beitrittsgebiet](#). Die ebenfalls von der Volkskammer eingerichteten [neuen Bundesländer](#) entsprachen weitgehend den 1952 als Verwaltungseinheit unbedeutend gewordenen [Ländern in der DDR](#). Völkerrechtlich genehmigt wurde der Beitritt im Rahmen des Zwei-plus-Vier-Vertrags vom 12. September 1990. Darin gaben die [vier Siegermächte](#) des [Zweiten Weltkriegs](#) ihre letzten verbliebenen Rechte gegenüber [Deutschland als Ganzem](#) auf, der letzten Einschränkung der [Souveränität](#).

Das [Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland](#) bot in seiner alten Fassung zwei Möglichkeiten der Wiedervereinigung: Die Wiedervereinigung durch den Beitritt von „*anderen Teilen Deutschlands*“ gemäß Artikel 23 a. F. und die Wiedervereinigung durch Inkrafttreten einer Verfassung, „*die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist*“ (Art. 146 GG). Da der schnellstmögliche Weg von der DDR-Bevölkerung und der frei gewählten Volkskammer gewünscht wurde (und viele [DDR-Bürger](#) bereits in den Westen übersiedelten), wurde die Möglichkeit nach Art. 23, der Beitritt, gewählt. Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung hätte länger gedauert. 1990 wurden der Wiedervereinigungs-Artikel 23 gestrichen und in Präambel und Artikel 146 auf die erfolgte staatsrechtliche Vollendung der Einheit hingewiesen.

Einen besonderen Status nahm dabei die Stadt Berlin ein. Formal unterstand die Stadt dem [Viermächtestatus](#), während die DDR den Ostteil Berlins als Bestandteil (und Hauptstadt) der DDR betrachtet hatte. Aus diesem Grund musste der Ostteil Berlins auch nicht beitreten, sondern wurde wieder ordentlicher Bestandteil des ohnehin bestehenden Landes Berlin, so dass nicht nur Deutschland, sondern auch Berlin wiedervereinigt wurde.

Vorgeschichte]

Deutsche Teilung (1949–1989)



Deutsche Länder in den Besatzungszonen

Nach dem Ende des [Zweiten Weltkrieges](#) war das besiegte [Deutsche Reich](#) 1945 zunächst in [Besatzungszonen](#) aufgeteilt worden. Nach Abtreten der nach 1937 erworbenen Gebiete sowie des [Saarlands](#) an Frankreich, [Helgolands](#) an Großbritannien und außerdem [Ober-](#) und [Niederschlesiens](#), der [Neumark](#), [Hinterpommerns](#) und [Ostpreußens](#) unter die Verwaltung Polens beziehungsweise der Sowjetunion wurden in den vier Besatzungszonen vorerst im Westen je drei, im Osten fünf Länder gebildet (sowie die [Stadtstaaten](#) Hamburg, Bremen und Berlin), an deren Grenzen sich auch trotz Grenzänderungen nach 1948 bzw. 1990 die Grenzen der Bundesländer orientierten. 1949 wurden die beiden Staaten Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik konstituiert. Während des [Kalten Krieges](#) standen sich beide Staaten im Rahmen ihrer jeweiligen politischen Bündnisse mit den Supermächten [USA](#) und [Sowjetunion](#) feindlich gegenüber. Schon seit Mitte der 1950er-Jahre schottete die DDR ihr Staatsgebiet gegenüber der Bundesrepublik durch die militärische Befestigung der [innerdeutschen Grenze](#) ab, deren Höhepunkt und Vollendung der Bau der [Berliner Mauer](#) am 13. August 1961 darstellte.



Berliner Mauer 1980

Das Saarland (siehe [Abtrennung des Saarlands nach 1945](#)) war nach Gründung der Bundesrepublik von Frankreich zu einem autonomen [Protektorat](#) umgestaltet worden, mit starker wirtschaftlicher, aber nicht politisch-rechtlicher Einheit mit Frankreich; es besaß wie ein eigener Staat eigene Pässe, Regierung und Währung. Im Jahr 1955 wurde das Saarstatut abgelehnt, das diesen Zustand verfestigen sollte. Daraufhin beschlossen Frankreich und die Bundesrepublik im [Saarvertrag](#) den Beitritt zur Bundesrepublik nach Artikel 23 GG, der auch später für die DDR genutzt wurde. Nachdem der Saarvertrag vom 27. Oktober 1956 durch das saarländische Parlament ratifiziert wurde, ist das Saargebiet seit dem 1. Januar 1957 ein [Bundesland](#)^[5] der Bundesrepublik Deutschland. Die Wirtschaftseinheit mit Frankreich endete erst am 5. Juli 1959, woraufhin das Saarland ab dem 6. Juli 1959 auch wirtschaftlich wieder der Bundesrepublik Deutschland angegliedert wurde. Frankreich behielt jedoch in Art. 83 für 25 Jahre das Recht zum Bezug von einem Drittel der saarländischen Kohle. Außerdem verpflichtete sich die Bundesrepublik zum Ausbau der [Mosel](#) und des [Oberrheins](#). Die reibungslose Durchführung des Luxemburger Saarvertrages erleichterte entscheidend den Fortgang der deutsch-französischen Aussöhnung.

Auch eine gewisse politische Entspannung im Zuge von [Willy Brandts Neuer Ostpolitik](#) ab Anfang der 1970er Jahre konnte die deutsche Teilung nicht überwinden. Befürworter der Politik Brandts betonten aber, dass die errungenen Erleichterungen (einfachere Besuchsregelungen) die Teilung etwas gemildert hätten.

Niedergang der DDR [[Bearbeiten](#)]

Die wirtschaftliche Situation der DDR wurde in den 1980er-Jahren zunehmend bedrohlicher für den gesamten Staat. Immer deutlicher wurde, dass das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem der DDR den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ansprüchen ihrer Bürger nicht gerecht werden konnte und die Führung unter [Erich Honecker](#) die Reformbegehren ignorierte. Nicht zufällig fällt in diese Periode eine deutlich zunehmende Bedeutung von Bürgerrechts- und Menschenrechtsgruppen. Diese forderten die politische und persönliche Freiheit und die Einhaltung der Menschenrechte. Die Zahl derjenigen wuchs an, die nicht mehr an eine Reformfähigkeit ihrer Regierung, ja ihres Staates überhaupt glaubten und ihren Protest und Unwillen durch das Stellen von Ausreiseanträgen oder gar durch die sogenannte „[Republikflucht](#)“ in die Bundesrepublik ausdrückten. Diese Reaktion wurde auch als „Abstimmung mit den Füßen“ bekannt.

Ursachen für den Niedergang sind folgende Punkte:

- Wirtschaftliche Schwäche, besonders gegenüber der Bundesrepublik; Krise der DDR-Planwirtschaft, Unterversorgung mit Alltagswaren (zum Beispiel Ersatzteile, Maschinen, Baumaterial), Embargopolitik, drohender Kollaps der Staatsfinanzen und damit die Zahlungsunfähigkeit der DDR
- Missachtung von Bürgerrechten wie Meinungs-, Reise- und Demonstrationsfreiheit
- fehlende Gerechtigkeit durch die [Abhängigkeit der Justiz von der SED](#)
- Staatliche Repressionen, insbesondere auch durch [Stasi-Bespitzelung](#)
- Wahlfälschungen, durch Bürgerrechtsgruppen erstmals nachgewiesen bei den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989, verordnet durch die SED seit den ersten Wahlen in der DDR am 16. Mai 1949^[6]
- Reformunfähigkeit der überalterten SED-Führung (im Gegensatz zur späteren KPdSU unter Gorbatschow)
- parallel ablaufende und vergleichbare Ereignisse im sozialistischen Ausland

Vorangetrieben wurden der Niedergang der DDR auch durch äußere [Katalysatoren](#) – an erster Stelle die sowjetische Reformpolitik von [Glasnost](#) und [Perestroika](#) unter KPdSU-Generalsekretär [Michail Gorbatschow](#). Die Auslandsdienststelle des [KGB](#) in [Berlin-Karlshorst](#) startete unter Leitung von [Anatoli Nowikow](#) die Operation „Lutsch“ ([russisch](#) für Strahl). Sie hatte das Ziel, reformwillige DDR-Bürger aus allen gesellschaftlichen Bereichen dazu zu bewegen, die DDR im Sinne Gorbatschows zu [demokratisieren](#). Bis heute ist nicht geklärt, welchen konkreten Einfluss der KGB auf die [Wende](#) tatsächlich hatte.^[7] Am 6. Juli 1989 lehnte Gorbatschow eine [Intervention](#) von sowjetischen Truppen gegen mögliche Unruhen ab, im Vorjahr war die [Breschnew-Doktrin](#) beendet worden. Die Existenzgarantie der DDR ging damit verloren.

Die DDR-Regierung versuchte einerseits, der sich abzeichnenden Zuspitzung der Situation durch Entgegenkommen, beispielsweise durch Reiseerleichterungen für Verwandtenbesuche in der Bundesrepublik, zu begegnen. Andererseits reagierte sie mit extremem Beharren auf alten Mustern der Herrschaftsausübung. Signifikante Beispiele dafür sind das Festhalten an der [Berliner Mauer](#) und die unbeirrt fortgeführten aufwändigen Planungen zur Feier des 40. Jahrestages der DDR-Gründung – trotz gleichzeitig überall stattfindender Protestumzüge. Gerade die als unangemessen aufwändig empfundenen DDR-Geburtstagsfeierlichkeiten schürten den Unwillen derjenigen Bürger, die ihren Staat demokratisch reformiert und nicht verherrlicht sehen wollten.

Wende in der DDR

Massenflucht von DDR-Bürgern (Sommer 1989)



Palais Lobkowitz – Deutsche Botschaft in [Prag](#)

Am 2. Mai 1989 begann [Ungarn](#) die Grenzanlagen zu [Österreich](#) abzubauen. In der Folge versuchten Hunderte von DDR-Bürgern, über Ungarn in den Westen zu gelangen. Gleichzeitig begaben sich viele in die Botschaften der Bundesrepublik in [Budapest](#), [Prag](#) und [Warschau](#) und in die [Ständige Vertretung](#) in Ost-Berlin, um [bundesdeutsche](#) Reisepapiere zu erhalten. Die bestürmten Botschaften mussten im August/September wegen Überfüllung geschlossen werden. Am 19. August kam es infolge des [Paneuropäischen Picknicks](#) zu einer Massenflucht von DDR-Bürgern nach Österreich; Ende August begannen in Bayern Vorbereitungen zur Errichtung von Notaufnahmelagern.

Am 11. September öffnete die ungarische Regierung offiziell die Grenzen nach Österreich und die Flüchtlinge konnten ausreisen. Dies geschah teilweise organisiert durch DRK-Bustransporte über österreichisches Gebiet ins Notaufnahmelager Freilassing. Am 30. September folgten die Botschaftsflüchtlinge in Prag und Warschau.^[8] Sie wurden mit verschlossenen Sonderzügen im Transit über DDR-Gebiet nach Westen gefahren. Während der Durchfahrt wurden Bahnhöfe abgesperrt, da immer wieder Menschen versuchten, auf die Züge aufzuspringen. Auf dem [Dresdner Hauptbahnhof](#) gerieten Demonstranten und Sicherheitskräfte dabei in schwere Auseinandersetzungen. Im selben Monat hatte Ungarn bereits etwa 30.000 Ausreisewillige ohne Absprache mit der DDR ausreisen lassen.

Demonstrationen in der DDR, Bürgerbewegungen [[Bearbeiten](#)]

In der DDR selbst kam es zu immer mehr Demonstrationen; vor allem die seit dem 4. September 1989 nach den wöchentlichen Friedensgebeten in der [Nikolaikirche](#) stattfindenden sogenannten [Montagsdemonstrationen](#) in [Leipzig](#) gewannen starken Zulauf. Am 9. Oktober 1989 hörte man auf der friedlichen Montagsdemonstration mit 70.000 Teilnehmern erstmals den Ruf „Wir sind das Volk“, mit dem politisches Mitspracherecht eingefordert wurde.

Der 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 [[Bearbeiten](#)]

Trotz allem lud die DDR-Regierung unter [Erich Honecker](#) zur Feier zum 40. Jahrestag der Gründung der [Deutschen Demokratischen Republik](#) nach [Berlin](#) ein. Dabei wurden die Demonstrierenden gewaltsam von der offiziellen Parade ferngehalten.



Propagandatafel zum 40. Jahrestag der DDR

Selbst [Gorbatschow](#) deutete am 5. Oktober 1989 auf dem Flughafen zu Honecker mit seinem inzwischen sprichwörtlichen Hinweis „*Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!*“ an, dass er Reformen in der Deutschen Demokratischen Republik für längst überfällig halte, und dass von der UdSSR keine Hilfe zu erwarten sei. Er sagte zu Honecker „*Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.*“^[9]

Die Folge war, dass sich die Parteiführung der [SED](#) darüber zerstritt, wie denn nun vorzugehen sei. Am 18. Oktober, einen Tag nach der zweiten großen Montagsdemonstration, trat Erich

Honecker nach Aufforderung des Politbüros von allen Ämtern „aus gesundheitlichen Gründen“ zurück. Sein Nachfolger wurde [Egon Krenz](#). Im November 1989 kam es zur Bildung eines neuen [Politbüros](#) und zur Wahl von [Hans Modrow](#) zum Vorsitzenden des [Ministerrates der DDR](#). Allerdings bewirkten diese Veränderungen und Reformen kaum eine Beruhigung.

Fall der Mauer am 9. November 1989 [[Bearbeiten](#)]

→ *Hauptartikel:* [Berliner Mauer](#)

Seit dem 3. November durften DDR-Bürger ohne Formalitäten über die Tschechoslowakei ausreisen, es kam zu einer erneuten Ausreisewelle. Am 4. November kam es auf dem Berliner Alexanderplatz mit etwa einer Million Teilnehmern zur größten Demonstration in der Geschichte des Staates, dies wurde vom Fernsehen live übertragen. Am 7. November traten die Regierung und das Politbüro zurück.



Pressekonferenz mit [Günter Schabowski](#) am 9. November 1989



Bürger der DDR und der BR Deutschland warten auf die Öffnung der Mauer vor dem [Brandenburger Tor](#), Dezember 1989



Öffnung der Grenze bei Lübeck, November 1989

Am 9. November um 18:57 Uhr verlas [Günter Schabowski](#) vor laufenden Kameras, dass ab sofort Privatreisen ins „Ausland“ (also auch in die Bundesrepublik und nach [West-Berlin](#)) ohne Vorliegen von Voraussetzungen wie Reiseanlässen oder Verwandtschaftsverhältnissen beantragt werden könnten.^{[10][11]} Erst auf Nachfrage eines italienischen Journalisten sagte er, sie trete „meiner Meinung nach sofort in Kraft“. Die Genehmigungen würden kurzfristig erteilt. Ausreisen könnten über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur Bundesrepublik erfolgen. Tausende eilten an die Grenzen. Die unvorbereiteten Grenzsoldaten öffneten die Übergänge der *Berliner Mauer* und der Grenze zur Bundesrepublik, zunächst noch kontrolliert im Wege der für Massen-„Provokationen“ vorgesehenen sogenannten Schleusenlösung (= Ausbürgerung aus der DDR per Stempel im Reisedokument), später aufgrund des unbeherrschbaren Andranges unkontrolliert. Am darauffolgenden Tag besuchten Millionen von DDR-Bürgern die grenznahen Städte der Bundesrepublik, vor allem den Westteil Berlins. Es kam zu Freudenzenen und fremde Menschen feierten miteinander. In West-Berlin und in der Bundesrepublik wurden die Besucher mit einem [Begrüßungsgeld](#) von 100 D-Mark je Person empfangen, das allein bis Ende November 1989 18 Millionen Mal ausgezahlt wurde.^[12]

[Bundeskanzler Helmut Kohl](#) unterbrach seinen Staatsbesuch in [Warschau](#) und sprach am Abend des 10. November vor dem [Schöneberger Rathaus](#) im Westteil Berlins auf einer Kundgebung

vor 30.000 Teilnehmern aus Ost und West.^[13] Der SPD-Ehrenvorsitzende [Willy Brandt](#) prägte dort den Satz „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“. Am selben Abend gab es außerdem eine Kundgebung vor dem Europa-Center im Westteil der Stadt mit 150.000 Teilnehmern, auf der Kohl begeistert empfangen wurde.

Auf dem Weg zur Einheit



Der Vorsitzende des DDR-Ministerrates [Hans Modrow](#), Bundeskanzler [Helmut Kohl](#), der Regierende Bürgermeister (West-Berlin) [Walter Momper](#) und im Hintergrund zwischen Kohl und Momper der Oberbürgermeister (Ost-Berlin) [Erhard Krack](#) während der Öffnung des Brandenburger Tores am 22. Dezember 1989

Weitere Entwicklung in der DDR und der Bundesrepublik

Am 13. November 1989 wurde [Hans Modrow](#) als DDR-Ministerpräsident von der [Volkskammer](#) gewählt. Bereits am 28. November präsentierte Kohl im [Deutschen Bundestag](#) in Form eines [Zehn-Punkte-Programms](#) einen Vorschlag für eine Konföderation zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Der mit dem Koalitionspartner FDP nicht abgesprochene Plan sollte dabei in den gesamteuropäischen Einigungsprozess integriert sein mit dem letztlich Ziel einer vollständigen Wiedervereinigung [Deutschlands](#). Dabei versuchte der Plan sich an den jeweiligen Vorgaben der ehemaligen Siegermächte zu orientieren.



Volksfeststimmung rund um das [Brandenburger Tor](#), Silvester 1989

Anfang Dezember wurde die Festschreibung der Führungsrolle der SED aus der [Verfassung](#) gestrichen und gegen ehemalige Funktionäre der SED, darunter Erich Honecker, ermittelt. Egon Krenz trat von allen Ämtern zurück, Nachfolger als [Staatsratsvorsitzender](#) wurde [Manfred Gerlach](#) ([LDPD](#)). Am 7. Dezember kam es erstmals zu Gesprächen am [Runden Tisch](#) mit den ehemaligen Blockparteien und [Oppositionsgruppen](#). Zwei Tage später wurde [Gregor Gysi](#) Parteivorsitzender der SED, die später in [Partei des Demokratischen Sozialismus](#) (PDS) umbenannt wurde.

Im Januar 1990 änderte sich der Ton der immer noch stattfindenden Montagsdemonstrationen von „Wir sind das Volk“ zu „Wir sind ein Volk“ und „Deutschland einig Vaterland“ (ein Zitat aus der Hymne der DDR). Am 15. Januar stürmten Demonstranten die Stasizentrale im Ostteil Berlins.

Volkskammerwahl im März 1990

Am 18. März wurde die erste freie Volkskammer gewählt. Hierbei errang die [Allianz für Deutschland](#), ein Wahlbündnis aus [CDU](#), [Deutscher Sozialer Union](#) (DSU) und [Demokratischem Aufbruch](#) (DA) eine deutliche Mehrheit. Gemeinsam mit der [Ost-SPD](#) bildete sie am 12. April 1990 eine große Koalition unter Ministerpräsident [Lothar de Maizière](#) (CDU),

die die Vereinigung mit der Bundesrepublik vorbereitete. Am 5. April war [Sabine Bergmann-Pohl](#) Volkskammerpräsidentin und damit letztes Staatsoberhaupt der DDR geworden.

Staatsvertrag über eine Währungsunion



Hundertmarkscheine West und Ost

Die ab März 1990 einsetzenden gemeinsamen Verhandlungen der neuen DDR-Führung und der Kohl-Regierung führten zunächst zur Unterzeichnung eines [Staatsvertrags](#) über eine gemeinsame [Wirtschafts-](#), Währungs- und Sozialunion am 18. Mai 1990. Allerdings gab es bereits vor diesem Vertrag Stimmen, die vor den Konsequenzen einer schnellen Währungsunion warnten, darunter den *Warnruf der ökonomischen Vernunft* namhafter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler aus DDR und Bundesrepublik, da die ostdeutsche Wirtschaft ohne den Schutz von Wirtschaftsgrenzen nicht so schnell überlebensfähig sein könne. Am 1. Juli trat die [Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion](#) zwischen Bundesrepublik und DDR in Kraft, und die Deutsche Mark wurde offizielles Zahlungsmittel in der DDR. In einer Fernsehansprache an diesem Tag prognostizierte Helmut Kohl mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung „[Blühende Landschaften](#)“.

Mitte Juli wurde gemäß dem Vertrag über die [Wirtschaftsunion](#) die [Treuhandaanstalt](#) gegründet. Ihre Aufgabe war es, die [Volkseigenen Betriebe \(VEB\)](#) der DDR nach den Grundsätzen der [Sozialen Marktwirtschaft](#) zu privatisieren oder stillzulegen und die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern (§ 8 Treuhandgesetz). Sie wurde 1994 aufgelöst und hatte 200 Mrd. DM Schulden hinterlassen, die (als [Erblastentilgungsfonds](#)) vermutlich 2011 abbezahlt sein werden.

Einigungsvertrag



Beide Exemplare des Einigungsvertrages vereinigt im Archiv des [Auswärtigen Amtes](#) in Berlin Am 31. August 1990 folgte der [Einigungsvertrag](#), der durch eine „Vereinbarung zur Durchführung und Auslegung“ am 18. September 1990 ergänzt wurde. Hierin wurden die Modalitäten des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland laut dem damaligen Wortlaut des Artikels 23 geregelt. Er sah insbesondere vor:

- Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland, das [Grundgesetz](#) sollte für das gesamte deutsche Volk geltend werden,
- am 3. Oktober 1990 sollte die Wiedervereinigung vollzogen werden (vgl. Artikel [Tag der Deutschen Einheit](#)), [Verfassungsänderungen](#) bezüglich der Einheit sollten innerhalb von zwei Jahren geschehen,
- die Volkskammer entsendet 144 [Abgeordnete](#) in den [Deutschen Bundestag](#) und Vertreter in den Bundesrat (bis zu den jeweils ersten Landtagswahlen),
- Verbleib der Stasi-Akten im ehemaligen DDR-Gebiet,
- Berlin ist die [Hauptstadt](#) der [Bundesrepublik Deutschland](#),
- mögliche Abweichungen vom Grundgesetz im Beitrittsgebiet für eine Übergangszeit.

Am Morgen des 23. August 1990 stimmte die Volkskammer mit 299 von 380 Stimmen dem Einigungsvertrag zu (siehe ausführlicher: [Tag der Deutschen Einheit: Wahl des 3. Oktober](#)), am Morgen des 31. August folgte der Bundestag (mit 442 von 492 Stimmen) und der Bundesrat noch am selben Morgen einstimmig; schon mittags wurde der Einigungsvertrag unterzeichnet.^[14] Die Einheit Deutschlands kam somit durch den Willen aller Deutschen demokratisch legitimiert zum Ausdruck.^[15]

Zwei-plus-Vier-Vertrag

Parallel zu der innerdeutschen Entwicklung vollzog sich die Einbeziehung ausländischer Staaten, insbesondere der [Siegermächte](#) des Zweiten Weltkriegs und der Nachbarstaaten.

Um den [Zwei-plus-Vier-Vertrag](#) abzuschließen und den äußeren Rahmen der Wiedervereinigung zu besprechen, waren bereits am 13. Februar 1990 die Außenminister der beiden deutschen Staaten und die Außenminister der vier Mächte zusammengekommen. Dabei ging es in erster Linie um die Sicherheit der deutschen Nachbarn. In weiteren Folgekonferenzen einigte man sich darauf, den Deutschen den Modus der Wiedervereinigung zu überlassen. Allerdings wurde verlangt, dass eine formale Anerkennung der Westgrenze Polens erfolgte ([Deutsch-polnischer Grenzvertrag](#)). Das Problem der Einbindung eines deutschen Gesamtstaates in wie auch immer geartete Bündnissysteme blieb jedoch bestehen.

Nach diesem ersten Teilerfolg gelang Helmut Kohl gemeinsam mit Außenminister [Hans-Dietrich Genscher](#) am 16. Juli der medienwirksame „Durchbruch im [Kaukasus](#)“^[16] bei einem Besuch in der Jagdhütte^[17] von Gorbatschow, der die Zustimmung zur vollen [Souveränität](#) eines wiedervereinigten Deutschlands inklusive [NATO](#)-Mitgliedschaft erteilte, was für die Einwilligung der USA notwendig war. Damit hatte Deutschland (*als Ganzes*) – verstanden als [Bundesrepublik Deutschland](#) und DDR zusammen erstmals seit Kriegsende das Recht, frei über seine Bündniszugehörigkeit zu entscheiden: seit 1945 waren beide Teile Deutschlands in ihrer Bündniswahl von den Alliierten abhängig, was bei der Verleihung der Souveränität 1955 im [Deutschlandvertrag](#) der [Pariser Verträge](#) festgeschrieben worden war; darüber hinaus regelten [alliierte Vorbehaltsrechte](#) von 1955 bis 1990 auswärtige Angelegenheiten „*einschließlich völkerrechtlicher Abkommen, die von Deutschland oder mit Wirkung für Deutschland abgeschlossen werden.*“ Die Siegermächte stimmten am 12. September in den „Zwei-plus-Vier-Gesprächen“ zu.

Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990



Hauptfeierlichkeiten vor dem [Reichstagsgebäude](#)



[Richard von Weizsäcker](#) beim Staatsakt zur Wiedervereinigung in der [Berliner Philharmonie](#)

Am 3. Oktober 1990 um 0:00 Uhr wurde vor dem [Reichstagsgebäude](#) unter dem Geläut der [Freiheitsglocke](#), dem Hissen der [Nationalflagge](#), dem Singen der [deutschen Nationalhymne](#) und dem Vorlesen der geänderten [Präambel des Grundgesetzes](#) durch Bundespräsident [Richard von Weizsäcker](#) das wiedervereinigte Deutschland proklamiert. Anschließend folgten in Berlin und in den meisten Städten und Gemeinden der „neuen“ Bundesrepublik farbenprächtige Feuerwerke. Mit der Eingliederung der auf dem Territorium der DDR gegründeten Länder wurde die Wiedervereinigung Deutschlands vollzogen und die DDR damit durch den Beschluss der ersten aus geheimer und freier Wahl hervorgegangenen eigenen Volksvertretung aufgelöst. Der [Einigungsvertrag](#) wurde zu diesem Termin wirksam, weil dies der frühestmögliche Zeitpunkt für die Vollziehung der Einheit war; das [Bundeskabinett](#) wollte zuvor die [KSZE](#)-Außenministerkonferenz über die Ergebnisse der [Zwei-plus-Vier-Verhandlungen](#) informieren. Diese Konferenz sollte am 2. Oktober stattfinden. Der 3. Oktober war im Einigungsvertrag als „[Tag der Deutschen Einheit](#)“ und [Nationalfeiertag](#) festgelegt worden und ersetzte damit in der „alten“ [Bundesrepublik](#) als gesetzlicher Feiertag den [17. Juni](#), den damaligen „Tag der deutschen Einheit“ zum Gedenken an den Volksaufstand 1953 in der DDR.^[18]

Am 22. Juli 1990 wurde von der Volkskammer das Verfassungsgesetz zur Bildung von Ländern in der DDR verabschiedet, nach dem mit Wirkung vom 14. Oktober die fünf Länder [Brandenburg](#), [Mecklenburg-Vorpommern](#), [Sachsen](#), [Sachsen-Anhalt](#) und [Thüringen](#), die am 25. Juli 1952 aufgelöst worden waren, neu gegründet wurden.^[19] Durch den Einigungsvertrag wurde die Ländergründung auf den 3. Oktober, den Tag der Wiedervereinigung, vorgezogen. Die wiedervereinigte Stadt Berlin bildete von nun an ein eigenes Land und wurde im Einigungsvertrag zur [Hauptstadt](#) Deutschlands erklärt. Schon 1949 war [Bonn](#) zur bloß [vorübergehenden Hauptstadt erklärt](#) worden, nach kontroverser Diskussion beschloss der Bundestag im [Hauptstadtbeschluss](#) 1991, Berlin auch zum Sitz von Parlament und Regierung zu machen und deren Umzug bis 1999 abzuschließen, wobei alle Ministerien auch einen Dienstsitz in Bonn behalten sollten. Das [Amt Neuhaus](#) beschloss 1993 die Rückkehr nach Niedersachsen, von dem es nach dem Zweiten Weltkrieg getrennt worden war.

Reaktionen auf die Wiedervereinigung

Aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland

In [Westdeutschland](#) hatten sich weite Teile der Bevölkerung seit Mitte der 1970er-Jahre (und der gegenseitigen Anerkennung der beiden deutschen Staaten) nach und nach mit der politischen Realität einer Teilung Deutschlands abgefunden und eine Wiedervereinigung in absehbarer Zeit nicht mehr als realisierbar betrachtet. Umso überraschter waren die Westdeutschen, als im November 1989 die Mauer fiel und im Laufe des folgenden Jahres die Einheit in immer greifbarere Nähe rückte.

Neben Dankbarkeit über die historische Entwicklung trat aber auch der Argwohn, dass der hohe [Wirtschaftsstandard](#) des Westens – gerade nach den ersten Bildaufnahmen der DDR-Industriegebiete – durch die materiellen und psychologischen Hinterlassenschaften der maroden Staatswirtschaft massiv gefährdet werden könnte. Billige, durch Konsumversprechen verführbare [Arbeitsmigranten](#) aus dem Osten könnten zudem im Westen hart erkämpfte [Tariferrungenschaften](#) gefährden. Vor allem in der SPD gab es ablehnende Stimmen; [Hans-Jochen Vogel](#) warf dem Spitzenkandidaten von 1990, [Oskar Lafontaine](#), vor, er ziehe es vorgeblich in Betracht, nach dem Mauerfall „die Bürgerinnen und Bürger der DDR künftig nicht mehr als Deutsche im Sinne des Grundgesetzes zu behandeln. Nach Öffnung der Mauer könne ihnen der Zugriff auf die sozialen Sicherungssysteme der Bundesrepublik nicht mehr offengehalten werden“. In der SPD gab es Uneinigkeit über den Standpunkt zu einer möglichen Wiedervereinigung: Während [Willy Brandt](#) diese befürwortete und öffentlich dafür warb, waren Oskar Lafontaine und [Gerhard Schröder](#) gegen eine schnelle Wiedervereinigung.^[20]

Ergebnis der [Bundestagswahl 1990](#) im früheren Bundesgebiet und dem ehemaligen [West-Berlin](#): Wahlbeteiligung 78,6 %, SPD 37,5 %, CDU/CSU 46,4 %, B90/Grüne 5,5 %, FDP 6,8 %, PDS 0,0 %, Sonstige 3,8 %.^[21]

Aus Sicht der Deutschen Demokratischen Republik



Demonstration gegen die Wiedervereinigung am 19. Dezember 1989 in Berlin



Vergleich der Ländergrenzen in der DDR 1947 und 1990

Die Regierung der DDR und ihre Organe sahen aufgrund des finanziellen Kollapses des [realsozialistischen](#) Systems keine Möglichkeit zur Beibehaltung des Status quo. Nachdem [Erich Honecker](#), der entscheidende Befürworter des gescheiterten Systems, am 18. Oktober 1989 zurückgetreten war, folgte die [SED](#)-Führung unter [Egon Krenz](#) am 8. November geschlossen diesem Beispiel und ermöglichte so freie Wahlen. Obwohl namhafte Intellektuelle der DDR für politische Reformen in der DDR warben, hoffte die Mehrheit der DDR-Bürger auf die deutsche Einheit.^[22] Dies wurde auch lautstark in den Montagsdemonstrationen gefordert.

In der einzigen freien Wahl in der DDR im März 1990 siegte die [Allianz für Deutschland](#) aus [CDU](#), [Demokratischem Aufbruch](#) und [Deutscher Sozialer Union](#), unter [Lothar de Maiziere](#), die eine möglichst schnelle Wiedervereinigung erzielen wollte.^[23]

Es gab zwar Angst oder Vorbehalte gegen die Abschaffung der [Sicherheiten](#) des sozialistischen Systems, insbesondere unter Anhängern der [SED-PDS](#) unter [Gregor Gysi](#). Die Soziale Marktwirtschaft im Westen wirkte bei der Mehrheit der Menschen jedoch gerechter als die mangelhafte Versorgung des [Sozialismus](#) und der Widerstand gegen die Wiedervereinigung in Volk und Politik war bedeutend schwächer als im Westen. Nach der erfolgten Wiedervereinigung gewann die CDU die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl am 2. Dezember 1990, wie schon zuvor die [Volkskammerwahl im März 1990](#).^[24] Die [SPD](#) hatte ohne Erfolg gegen den frühen Wahltermin protestiert. Die CDU setzte in ihrem Wahlkampf auf das Versprechen baldiger [blühender Landschaften im Osten](#), was von Wirtschaftsfachleuten jedoch als unrealistisch bezeichnet wurde.

Ergebnis der Bundestagswahl 1990 in den neuen Ländern einschließlich dem ehemaligen [Ost-Berlin](#): Wahlbeteiligung 74,5 %, SPD 25,4 %, CDU 42,8 %, Grüne 6,2 %, FDP 11,7 %, PDS 11,7 %, Sonstige 2,3 %.^[21]

Aus ausländischer Sicht

Aus Sicht der Sowjetunion

Die [Sowjetunion](#) war der maßgebliche Staat, der über die Entwicklung der DDR und der Wiedervereinigung entscheiden konnte, ohne ihre Zustimmung konnte es nicht vorangehen. Sie bestand zunächst auf der Bildung eines [neutralen](#) Deutschlands und warnte die beiden deutschen Staaten vor Alleingängen. Im Sommer 1990 gab [Michail Gorbatschow](#) nach vielen Gesprächen mit Bush und Kohl diese Position aber auf und billigte den Deutschen die Wiedervereinigung und volle Souveränität auch hinsichtlich der Entscheidung über ihre künftige politische

Orientierung zu; Gorbatschows Einverständnis war das bedeutendste, und der Einfluss seiner Frau [Raissa Maximowna Gorbatschowa](#) sowie die persönliche Beziehung zu Helmut Kohl spielten eine wichtige Rolle. Deutschland verpflichtete sich zur finanziellen Unterstützung [Russlands](#) bei der Rückführung seiner Soldaten und verzichtete auf den Besitz eigener [atomarer, biologischer oder chemischer Waffen](#).

Aus Sicht der USA

Bereits am 12. Juni 1987 hatte US-Präsident [Ronald Reagan](#) im Angesicht der [Berliner Mauer](#) gefordert: „Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!“ Und so betonte der [US-Botschafter Vernon A. Walters](#) anlässlich der Öffnung der innerdeutschen Grenze am 9. November 1989 auch, dass die Deutschen selbst über ihre Einheit zu entscheiden hätten, dass jedoch nach einer Wiedervereinigung Gesamtdeutschland der [NATO](#) und der [EG](#) angehören müsse. [George Bush](#) war der erste Befürworter der Wiedervereinigung unter den westlichen Alliierten, der gemeinsam mit Helmut Kohl vor allem Großbritannien und Frankreich überzeugte.

Aus Sicht des Vereinigten Königreiches

Erheblich stärkere Bedenken wurden indes von der Premierministerin [Großbritanniens Margaret Thatcher](#) geäußert. Sie sah in der deutschen Wiedervereinigung eine nachhaltige Störung des europäischen Gleichgewichts (*balance of powers*), auf das die Briten von jeher besonderen Wert gelegt hatten. Die Gefahr bestehe dabei weniger in einer militärischen Bedrohung, sondern entspringe vielmehr einer weiteren Stärkung der in [Europa](#) ohnehin schon dominanten deutschen [Wirtschaft](#). Die Wiedervereinigung dürfe man daher „nicht übereilen“. Mit der Anerkennung der [Oder-Neiße-Grenze](#) und dem resultierenden Verzicht auf alle Gebietsansprüche (Artikel 1, Absatz 1) gab [Großbritannien](#) seine Zustimmung.

Aus Sicht Frankreichs

Ähnliche Vorbehalte trug auch [Frankreich](#), das sich die gesamte [Nachkriegszeit](#) über als zentrale europäische Führungsmacht und insbesondere als informellen [Hegemon](#) in der [Europäischen Gemeinschaft](#) betrachtet hatte. Die Wiedervereinigung musste schon mit Blick auf die [Wirtschaftskraft](#) und Bevölkerungszahl eines vereinigten Deutschlands sowie seine zentralen Lage zu einer gravierenden Machtverschiebung in [Europa](#) führen, die von Frankreich mit Argwohn betrachtet wurde. Vielfach zitiert wurde in diesem Zusammenhang das Bonmot von [François Mauriac](#): „*Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich froh bin, dass es zwei davon gibt.*“^[25] Auch war bei vielen älteren Franzosen noch die Erinnerung an die Besatzung durch die [Wehrmacht](#) während des Zweiten Weltkrieges lebendig, die selbst die Entwicklung der Nachkriegs-Bundesrepublik zu einem verlässlichen Partner nur teilweise hatte tilgen können. Gleichwohl stimmte letztlich auch Frankreich der deutschen Wiedervereinigung zu, unter dem Versprechen, dass die [Bundeswehr](#) auf 370.000 Mann reduziert werden würde.

Aus Sicht Polens

[Polen](#) war, obwohl es kein den Siegermächten gleichwertiges Mitspracherecht hatte, insbesondere um seine territoriale Integrität besorgt und forderte bereits im Vereinigungsprozess die Anerkennung der [Oder-Neiße-Linie](#) als polnische Westgrenze ein. Dass Helmut Kohl bei Vorstellung seines *Zehn-Punkte-Programms* die Frage der Anerkennung der polnischen Westgrenze zunächst offenließ, sorgte für einige Irritationen, auch in der Bundesrepublik selbst.

Nach der Wiedervereinigung bis 1994



Briefmarke zum fünften Jahrestag der Öffnung der innerdeutschen Grenze

In den ersten Jahren zeigten sich recht bald Schwierigkeiten bei der Herstellung gleicher Lebensverhältnisse. Während beide Teile Deutschlands in staatlicher, wirtschaftlicher und weiteren Perspektiven eine Einheit bildeten, wollte sich die Angleichung der Lebensverhältnisse nicht einstellen.

Die 1990er-Jahre zeigten, dass die Wirtschafts-, Sozial- und Währungsunion, die mit Wirkung vom 1. Juli 1990 in Kraft getreten war, eine Maßnahme gewesen war, die zwar politisch korrekt und erforderlich war – denn schon riefen in der DDR große Sprechchöre: „Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh'n wir zu ihr!“^[26] –, im Gegenzug aber zu einem fast vollständigen Zusammenbruch der zurückgebliebenen Wirtschaft führte. Dies resultierte nicht nur aus der missachteten Erkenntnis, dass nahezu alle Maschinen veraltet waren und ein Viertel gar noch aus den 1930er-Jahren stammte,^[27] sondern auch aus dem Umstand, dass die bisherigen Absatzmärkte in den ehemaligen RGW-Staaten (COMECON) ersatzlos wegbrachen, da die bis dato übliche faktische Tauschwirtschaft entfiel und die Notwendigkeit bestand, mit (dort nicht ausreichend vorhandenen) Devisen zu bezahlen.

Als eine der Hauptursachen für die nur langsame Angleichung der Lebensverhältnisse nennt Uwe Müller^[27], dass die in der ganzen deutschen Geschichte einmaligen Transferleistungen nicht den Kern der Sache änderten, nämlich dass die Firmen und Menschen, die das Gebiet des heutigen Ostdeutschlands bis 1945 zum wirtschaftsstärksten Gebiet des Reiches gemacht hatten, seit Errichtung der SBZ in die Bundesrepublik ausgewandert waren. Besonders schwer sei dies dadurch, dass alle großen Konzerne (etwa Dresdner Bank, Alte Leipziger und Zeiss), die mit ihren Zulieferbetrieben die Region belebten, weggezogen bzw. nicht nach der Wiedervereinigung zurückgekehrt seien. Und trotz niedrigerer Löhne sei die Arbeitslosigkeit gestiegen. Gerade die für die Wirtschaft interessantesten Arbeitskräfte seien aus Ostdeutschland abgewandert, allein zwischen 1945 und 1961 2,5 Millionen, trotz der Mauer wanderten auch danach noch Menschen aus. Eine Satireseite schreibt, bei der gegenwärtig anhaltenden Entwicklung würde Halle schon 2068 menschenleer sein, denn seit 1990 sei jeder Dritte bereits abgewandert.^[28] Dass dies nicht bloß hohle Zahlen sind, ist auch an der schlechter werdenden sozialen Situation zu erkennen, junge Menschen, insbesondere gut Ausgebildete allgemein und Frauen im besonderen wandern aus,^[29] wodurch die demographischen Probleme der schon jetzt überalterten Bevölkerung absehbar sind, jährlich etwa 50.000 Personen.^[30]

Ein wichtiger Schritt war der sofortige Beginn der Aufklärung von Verbrechen durch den Staatsapparat. Die umfangreichste Datensammlung darüber sind die Dokumente des Ministeriums für Staatssicherheit, die durch die Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit dem Ziel der vollständigen Öffnung der Akten gesichert werden sollen. Viele Unterlagen waren zerkleinert oder verbrannt worden und sollen durch diese Behörde restauriert werden.

Wirtschaftliche Entwicklung

Es gab wirtschaftliche Probleme der ostdeutschen Betriebe aufgrund fehlender Investitionsmöglichkeiten, der daraus resultierenden veralteten Technik und der sehr personalintensiven Fertigung. Die Folgen sind bis heute spürbar, und auch im kommenden

Jahrzehnt werden Löhne und Investitionen weit hinter denen in den [alten Bundesländern](#) zurückliegen.^[31]

Ein großes Problem stellte der Zusammenbruch des [Ostblocks](#) insgesamt dar. Wichtigster Handelspartner für die DDR-Wirtschaft war bislang die UdSSR gewesen. Nach der Einführung der DM in den neuen Bundesländern und insbesondere nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schwand dieser Markt jedoch vollkommen. Wirtschaftlich besonders schädlich war dabei der politisch motivierte und von der Bevölkerung geforderte [Umtauschkurs](#), der neben einem altersabhängigen Sockelbetrag von 1:1 den Wert von 1 [DM](#) zu 2 [Mark der DDR](#) betrug. Ein realer Wechselkurs bestand durch die fehlende Konvertibilität der DDR-Mark nicht, die Kurse am grauen Markt schwankten aber in der Bandbreite 1:6 bis 1:9 (bei den Banken in der DDR). Die Schulden der Firmen wurden mit 1:2 umgerechnet, obwohl wertmaßstäblich allenfalls ein Kurs von 1:4 zu rechtfertigen gewesen wäre.^[32] Er sorgte dafür, dass die [Kosten für Arbeit](#) in Ostdeutschland noch vor der staatlichen Einheit derart explodierten, dass die Konkurrenzfähigkeit der meisten Betriebe empfindlich gestört wurde.



Protest gegen Arbeitsplatzabbau vor dem Werk der Faser AG in [Premnitz](#) am 10. Dezember 1990

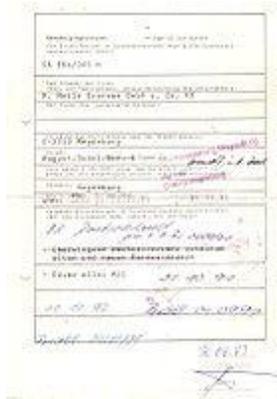
Die Betriebsstätten der [Kombinate](#), zu denen fast alle Betriebe zählten, waren häufig standörtlich stark zerrissen; zugleich waren Gebäude und Produktionsanlagen verschlissen und nicht mehr zeitgemäß. Der Strukturwandel bewirkte die [Entflechtung](#) der Großkombinate, die Umwandlung in Mittel- und Kleinbetriebe und die Stilllegung vieler Produktionsstätten. Verantwortlich für die Privatisierung war die [Treuhandanstalt](#). Unternehmen aus der Bundesrepublik hatten meist kein Interesse daran, Betriebe zu übernehmen oder weiterzuführen. Der Arbeitsplatzabbau war enorm. Die offizielle [Arbeitslosenquote](#) spiegelt die Realität dieser Zeit nicht wider, da Arbeiter in „[Kurzarbeit](#)-Null-Stunden“, der „Warteschleife“, in [Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen](#) und im [Vorruhestand](#) nicht als Arbeitslose in die Statistik eingingen.

Zum Beispiel führte die Einbindung der Landwirtschaft in die Agrarpolitik der [Europäischen Union](#) zur Stilllegung von landwirtschaftlicher Nutzfläche. In vielen Dörfern und Städten entstanden mit der Stilllegung von Betrieben Industriebrachen. Dies wurde [Deindustrialisierung](#) genannt, obwohl dieser Begriff prinzipiell eine Weiterentwicklung, eine [Tertiarisierung](#) zur [Dienstleistungsgesellschaft](#), darstellt. In einigen Regionen brachen ganze Wirtschaftszweige weg, da diese unter marktwirtschaftlichen Bedingungen gegenüber der Konkurrenz nicht mithalten konnten – zu hoher Aufwand an Arbeitskräften und gleichzeitige Produktion von Erzeugnissen, die zu nicht konkurrenzfähigen Preisen und mit veralteten Maschinen hergestellt wurden. Dies führte dazu, dass u. a. die lange ostdeutsche Tradition des Erzbergbaus 1991 beendet wurde.



Soziodemografische Entwicklung nach der Wiedervereinigung

Für die arbeitslos gewordenen Menschen gab es danach kaum mehr Beschäftigungsalternativen, da neue Investitionen nicht ausreichend neue Arbeitsplätze schufen. Der mit diesen Gründen einhergehende völlige Zusammenbruch der alten DDR-Wirtschaft bewirkte schließlich einen [Migrationsprozess](#) von historischen Ausmaßen. Allein von 1990 bis 1991 kehrten zwei Millionen Ostdeutsche ihrer Heimat den Rücken und wanderten auf der Suche nach Arbeit in die alten Bundesländer aus.



19a Transport-Genehmigung

Andererseits gaben die Behörden 1991 zusätzlich sogenannte *19-a-Transport-Genehmigungen* für den [Güterfernverkehr](#) heraus, um den Nachholbedarf der fehlenden Güter besser bewerkstelligen zu können.

Die Wiedervereinigung war für den deutschen Staat schon in diesen ersten Jahren eine große finanzielle Herausforderung. War die Regierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl anfangs nach eigenen Angaben davon ausgegangen, die Folgen der Wiedervereinigung „aus der Portokasse“ bezahlen zu können, offenbarte sich sehr schnell, dass die zu leistenden Aufwände alle bisherigen Vorstellungen überschreiten würden. Zur notwendigen Finanzierung wurde daher ein – zunächst befristeter – [Solidaritätszuschlag](#) auf die [Einkommensteuer](#) erhoben, zugleich wurde die Mineralölsteuer zum 1. Juli 1991 auf einen Schlag um den bis dahin nicht gekannten und auch bis heute nicht wieder erreichten Wert von 22 Pfennig (gut 11 Eurocent) je Liter Benzin erhöht, durch die zusätzlich anfallende [Mehrwertsteuer](#) betrug die tatsächliche Erhöhung rund 25 Pfennig (knapp 13 Eurocent).

Die Angaben über die für den Wiederaufbau aufgewendeten Summen schwanken, denn es ist strittig, welche Posten direkt der Wiedervereinigung zugerechnet werden können. Allein die 82 Milliarden aus dem Fonds Deutsche Einheit können klar zugeordnet werden. Schon bei den Kosten für die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, bei der aus 198 Mrd. Ost-Mark 120 Mrd. D-Mark wurden, ist wegen der stark unterschiedlichen Wechselkurse keine Kostenangabe möglich. Die [Treuhandanstalt](#) machte einerseits statt Gewinnen aus den Privatisierungen 200 Mrd. DM Schulden (als [Erblastentilgungsfonds](#) 336 Mrd. DM), andererseits konnte für die später entdeckten Betrugsfälle nur grob geschätzt werden, dass drei bis zehn Milliarden Mark verloren gegangen sind. Dabei sind ebenfalls nicht die durch Bestechung unter Wert verkauften Firmen eingerechnet, oder den Banken mitverkaufte Altschuldenforderungen in vielfacher Kaufpreishöhe.^[33] Eine detaillierte Aufstellung über die einheitsbedingten Kosten selbst nur über die erste gesamtdeutsche Legislaturperiode, von der Neuausstattung der Volksarmee bei Vereinigung mit der Bundeswehr über den Verkauf der Auslandsvertretungen der DDR bis zur Änderung der Verkehrsschilder, ist bisher überhaupt nicht möglich, schon gar nicht inklusive der Folgen für die Wirtschaftslage der neuen Bundesländer.

→ Für die wirtschaftliche Entwicklung über die ersten fünf Jahre hinaus siehe [Aufbau Ost](#)

Innere Einheit

Ein wichtiger Punkt der Entwicklung nach der Wiedervereinigung ist zweifelsohne die angestrebte *innere Einheit* Deutschlands. Für viele Deutsche, die während der Teilung

aufwuchsen, existiert nach wie vor die sogenannte „Mauer in den Köpfen“. Dieses Ost-West-Denken konnte bisher nicht völlig überwunden werden; so wird durch die beschriebenen niedrigeren Löhne im Osten eine Migration in den Westen gefördert, in den Osten erschwert, das gilt auch für staatliche Ämter. Kulturell sind besonders das [Ampelmännchen](#) und das ostdeutsche [Sandmännchen](#) zur gesamtdeutschen Alltagskultur geworden. Durch Übernahme verdrängte der [Rotkäppchensekt](#) den westdeutschen [Mummsekt](#), eine [Radeberger](#) Biersorte wirbt mit der Dresdner [Semperoper](#). Andere kulturelle Eigenheiten der DDR sind allerdings in Form der „[Ostalgic](#)“ ein rein verklärender Rückblick.

Die Wiedervereinigung führte zur Übernahme von [Gesetzen](#), [Normen](#), [Standards](#) und Strukturen aus dem Bereich des früheren Bundesgebietes. Zur Umsetzung wurden Beamte und Manager aus den alten Bundesländern entsandt und mit einer Sonderzahlung, der sogenannten [Buschzulage](#), entlohnt.

Bis zur Deutschen Einheit galten in beiden deutschen Staaten jeweils eigene Systeme für [Postleitzahlen](#) und [Telefonvorwahlen](#). Die [Deutsche Bundespost](#), die ab der Wiedervereinigung für beide Bereiche zuständig war, führte zum 1. Juli 1993 mit den [fünfstelligen Postleitzahlen](#) ein die Grenzen der Bundesländer ignorierendes Modell ein. Damit wurden gleichzeitig die im Laufe der Jahre erkannten Schwächen des bisherigen Systems der Postleitzahlen behoben, dessen Konzeption durchaus eine Wiedervereinigung vorgesehen hatte. Im Bereich der Telefonvorwahlen blieb eine Reform aus, da durch Erweiterung der Vorwahl auf sechs Ziffern (einschließlich führender Null) genügend Vorwahlnummern im Bereich „03“ (bisher nur in Form der „030“ für Berlin genutzt) zur Verfügung standen. Die internationale Vorwahl „0037“ für die DDR entfiel mit der Reform. Reformen von Vorwahlen werden allgemein nur sehr restriktiv vorgenommen und waren auch in der Bundesrepublik vor 1990 selten. Bei der Umstellung der Vorwahlen in den neuen Ländern blieben die Rufnummern erhalten, soweit dies möglich war, sodass der Umstellungsaufwand ähnlich wie bei der Postleitzahl nur die Vorwahlen betraf. Eine große Reform hätte in West und Ost zu massiven Veränderungen auch bei den Rufnummern geführt. In Anbetracht der technischen Schwierigkeiten einer gleichzeitigen Umschaltung und vor dem Hintergrund des Aufwandes, der im privaten und vor allem im geschäftlichen Bereich durch Verlust der Kommunikationsdaten durch eine solche Maßnahme entstanden wäre, wurden derartige Pläne nicht weiter verfolgt.

Bei den [Autokennzeichen](#) war das Unterscheidungszeichen „L“ bei der Einführung der neuen Ortskennzeichen 1956 für die Stadt Leipzig reserviert, jedoch in dem vergleichsweise gering besiedelten [Lahn-Dill-Kreis](#) ausgegeben worden; ab dem 1. Januar 1991 wurde dort die Ausgabe eingestellt, und das Kennzeichen „LDK“ eingeführt, damit die Leipziger Kraftfahrzeuge künftig das Kennzeichen „L“ nutzen konnten. Für die Unterscheidung der langen Übergangszeit haben die alten Lahner Kennzeichen den Bereich der Erkennungsbuchstaben AA–ZZ und der Erkennungszahlen 1–100, die Leipziger aber vier Ziffern. Auch die anderen Kennzeichen waren schon 1956 weitgehend geplant. In der DDR waren die Kennzeichen aus Bezirkskürzel und Nummer gebildet. Zu Unzufriedenheit kam es dabei auch in Halle (Kennzeichen HAL), da der Stadt nach ihrer Einwohnerzahl eine zweistellige Buchstabenkombination zugestanden hätte. Allerdings waren alle denkbaren und logischen Kombinationen („H“, „HA“, „HE“ und „HL“) bereits an Städte bzw. Kreise vergeben. [Chemnitz](#), das von 1953 bis 1990 durch Beschluss der Regierung der DDR *Karl-Marx-Stadt* hieß, erhielt im April 1990 per Bürgerabstimmung zum 1. Juni seinen alten Namen zurück.

Der deutsche [Bundespräsident Horst Köhler](#) äußerte später die Hoffnung, dass durch ein „echtes Zusammengehörigkeitsgefühl“ die noch für längere Zeit bestehenden wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ost und West leichter ertragen werden könnten. Doch bezeichnend für die „Mauer in den Köpfen“ ist beispielsweise, dass kein einziger westdeutscher Rundfunksender sich des reichhaltigen musikalischen Erbes der DDR angenommen hat; gerade einmal zum Tag der Deutschen Einheit wurden in den ersten Jahren noch ein paar bekanntere DDR-Titel gespielt.

Folgen der Deutschen Einheit seit 1995

1995 änderten sich wesentliche Aspekte im „Aufbau Ost“ genannten Prozess: Auf die [Abwicklung](#) der [Treuhandanstalt](#) und das Ende des [Fonds Deutsche Einheit](#) (Höhe: 82 Milliarden D-Mark) traf der [Solidarpakt](#), seit 2004 *Solidarpakt I* genannt. Außerdem änderte die [Bundestagswahl 1994](#) die Machtverhältnisse, die schwarz-gelbe Koalition verlor an Einfluss. Die Kritik an der Einheit änderte sich, insbesondere wurden vergangene und laufende Entscheidungen in Frage gestellt, wie die umfangreichen Mittel verwendet wurden; der 1998 aufgedeckte Betrugsskandal bei der Treuhandanstalt, der einen Schaden zwischen drei und zehn Milliarden Mark verursacht haben soll, war das bekannteste Beispiel.

Obwohl die wirtschaftlichen Auswirkungen der Teilung noch Jahrzehnte anhalten werden, haben die Kinder und Jugendlichen bereits diese Epoche aus den Augen verloren; den Schülern werden die grundlegendsten Informationen vorenthalten, wie der [Spiegel](#) am 27. Dezember 2007 berichtete: fehlende Presse- und Meinungsfreiheit, der Unterschied der Stasi zu der Arbeit anderer Geheimdienste, die Staatsform der Diktatur und die Todesstrafe waren insbesondere in Brandenburg höchstens der Hälfte der Schüler bekannt. Durchschnittlich drei Viertel befürworten aber das friedliche Ende der DDR, die Wiedervereinigung und die Notwendigkeit der Aufbauposten. Umfrageforscher Klaus Schroeder vermutete, veraltetes Lehrmaterial und Richtlinien, also die Kultusministerien, seien verantwortlich für das Ergebnis, und Eltern wie Lehrer idealisierten die sozialen Aspekte der DDR, während sie alle negativen Seiten ignorieren, die zur Wende führten.^[34]

Satire

1990 erschien der Film „[Das deutsche Kettensägenmassaker](#)“ von [Christoph Schlingensief](#), der die Wiedervereinigung unter dem Motto „Sie kamen als Freunde und wurden zu Wurst“ als Horrorfilm darstellt.

Der vielfach noch empfundene Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen wird auch satirisch behandelt, unter anderem der Autor und Verleger [Klaus Bittermann](#) erstellte zwei [Anthologien](#) dazu.

Die [Spaßpartei](#) „[PARTEI](#)“ um die Redaktionsmitglieder der Zeitschrift „[Titanic](#)“ hatte im [Bundestagswahlkampf 2005](#) den „Wiederaufbau der Mauer“ als zentralen Punkt in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Der Wiederaufbau der Mauer aufgrund des Beklagens über hohe Kosten für den [Solidarpakt](#) und eine angebliche persönliche wirtschaftliche Benachteiligung sind ein häufiges Thema.^{[35][36]}